



SETIAKY/RADAR JOGJA

PERTANYAKAN KE PUSAT: Mahasiswa UMY saat mendatangi Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro, Jogja, kemarin (31/1).

Mahasiswa UMY Datangi Kantor PP Muhammadiyah

Desak Cabut Pungutan Muktamar Rp 75 Ribu

JOGJA - Protes mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terhadap pungutan Rp 75 ribu untuk Muktamar ke-47 Muhammadiyah 2015 di Makassar, berlanjut. Sehari setelah menggelar aksi di kampus, mereka kemarin (31/1) mendatangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro, Jogja.

Kedatangan mereka untuk melaporkan rektor terkait terbitnya surat keputusan (SK) Rektor tentang dana muktamar yang dibebankan ke mahasiswa. Tidak hanya itu, mahasiswa juga melaporkan pihak kampus ke instansi penegak hukum seperti KPK, Kejati DIJ, dan Polda DIJ karena di-

nilai tidak ada transparansi penggunaan dana yang dipungut.

Mahasiswa mengaku kecewa terhadap pungutan itu. Mahasiswa baru mengetahui adanya pungutan saat membayar kartu rencana studi (KRS). Mahasiswa diwajibkan membayar Rp 75 ribu untuk yang sedang mengambil kuliah, dan Rp 50 ribu bagi yang akan wisuda.

Selain itu, mahasiswa juga melaporkan terkait fasilitas kampus yang mengarah ke kapitalis, bukan ke Islam. Di antaranya soal dana buku, uang wi-fi sebesar Rp 150 ribu - Rp 200 ribu. Mereka ingin ada transparansi dana-dana itu. Mereka mendesak SK penarikan kontribusi muktamar yang dibebankan ke mahasiswa, segera dicabut.

"Kami minta rektor segera memperbaiki transparansi anggaran," ujar Pra-

yoga, korlap aksi ini. Mereka mempertanyakan dasar pungutan Rp 75 ribu yang dibebankan kepada mahasiswa UMY. "Bukankah infak, sedekah, atau sejenisnya dilandaskan pada keikhlasan, bukan pemaksaan. Infak dan sedekah sesuai kemampuan umat," kata Prayoga.

Pungutan dana muktamar Muhammadiyah yang dibebankan kepada mahasiswa itu berdasarkan Keputusan PP Muhammadiyah yang ditindaklanjuti Keputusan Rektor No 024/SK-UMY/X/2014 tentang Kontribusi Mahasiswa UMY untuk muktamar ke-47 Muhammadiyah. Dalam surat itu dijelaskan, mahasiswa diwajibkan membayar dana muktamar senilai Rp 75 ribu. Jika tidak membayar, mahasiswa tidak dapat melakukan KRS untuk semester berikutnya. ([sky/laz/gp](#))